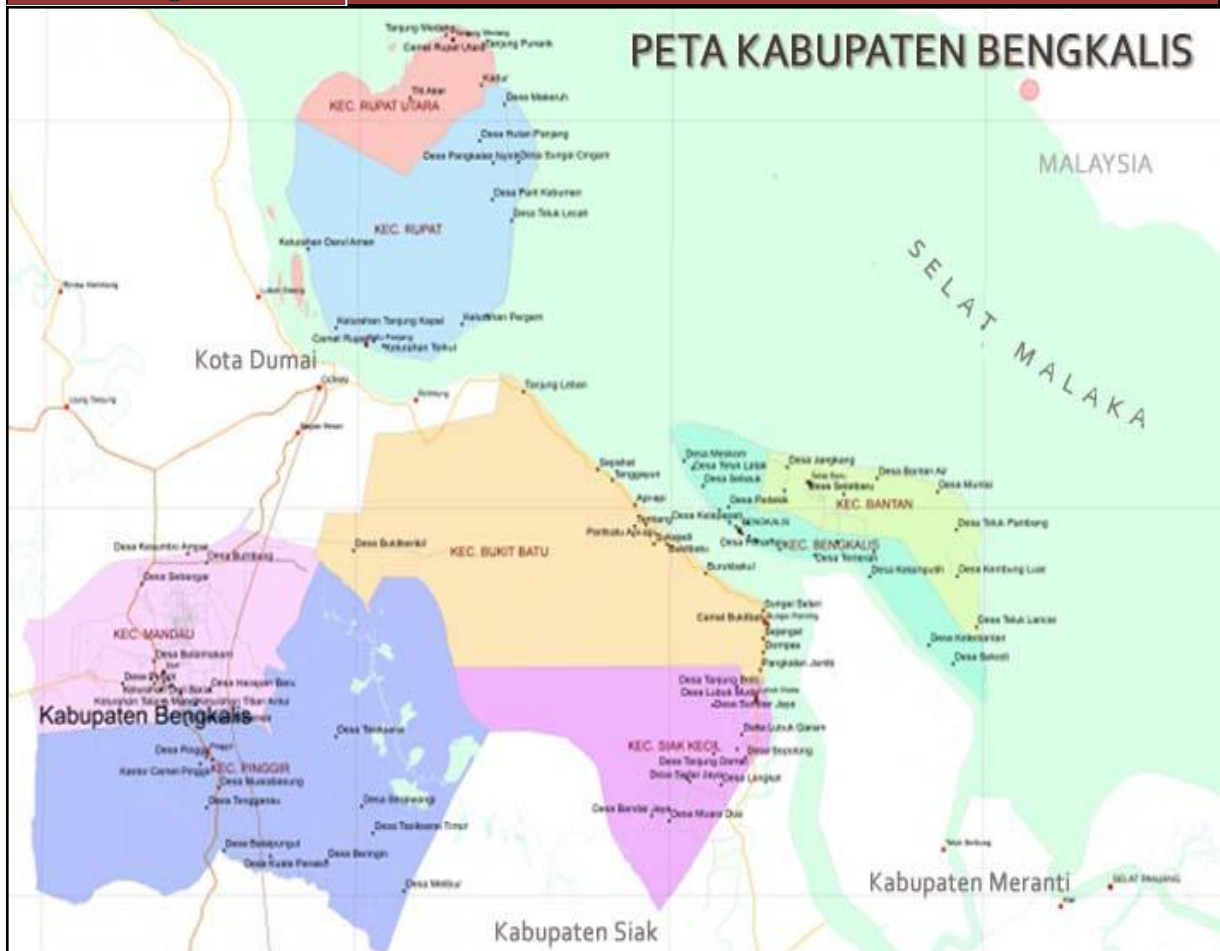




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

Daftar isi

Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif.....	3
Bab I Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	5
Bab II Perencanaan Kinerja	13
Perjanjian Kinerja.....	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Pengukuran Kinerja.....	17
B. Analisis Kinerja.....	19
C. Realisasi Anggaran.....	26
D. Analisis Efisiensi.....	28
Bab IV Penutup.....	29



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2019 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi tugas dan fungsi serta efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STTISTIK
KABUPATEN BENGKALIS

Drs.JOHANSYAH SYAFRI

Pembina Tk.I

NIP. 19680411 199303 1 009



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan PK tahun 2019, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis terdapat 7 (tujuh) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator untuk menilai realisasi dan capaian kinerja di tahun 2019.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dengan baik, yaitu dari 7 (tujuh) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator sasaran dimana 6 sasaran capaiannya di atas 70%, hanya 1 (satu) sasaran yang capaiannya 40%, 11 (sebelas) indikator capaian kinerja di atas 70% dan 2 (dua) indikator yang capaiannya dibawah 70%. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan, kerjasama dan koordinasi baik internal unit kerja maupun antar PD, kerja keras dan keuletan aparatur, serta dukungan anggaran dan regulasi yang baik. Namun demikian, untuk tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan tolok ukur kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 serta sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Sandi termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dibagi dalam Sub Urusan Informatika dan Komunikasi Publik, dan Aplikasi Informatika. Sub Urusan Informatika dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sub Urusan Aplikasi Informatika yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah 1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah

kabupaten/kota. 2) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Urusan Bidang Statistik terbagi kedalam Sub Urusan Statistik Sektoral dan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Untuk Urusan Bidang Persandian terbagi kedalam Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah 1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tersebut tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diatur dengan Peraturan Bupati Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Tugas dan fungsi tersebut antara lain:

- a. Perumusan, perencanaan kebijakan, teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas lingkup Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika yang bersifat teknis dan fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

D. Struktur Organisasi

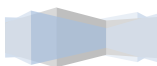
Untuk melaksanakan tugas pokok dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala mempunyai tugas:
 1. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi, informatika dan statistik;
 2. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
 - d. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- b. Sekretariat



1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
 2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset;
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program
 Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Umum dan Kepegawaian;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
1. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Uraian Tugas tersebut pada angka 1, sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub



- Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
 - a. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi, dan pelayanan informasi publik.
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis supervisi dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di ruang lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugasnya.
 - a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi

Seksi pengelolaan informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang pengelolaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Seksi Pelayanan Informasi Publik

Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis tentang Pelayanan



Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dibidang sumber daya komunikasi dan informatika, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- g. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan kontenitas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; dan
 6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- a. Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik
Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengolahan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Layanan Hubungan Media
Seksi Layanan Hubungan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Seksi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi
Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya komunikasi dan infromasi dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik
 1. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan sistem informasi/telematika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan system informasi/aplikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. pengelolaan system informasi/aplikasi/telematika dan pembangunan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian system informasi/aplikasi/telematika dan teknologi; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Seksi Aplikasi

Seksi Aplikasi melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

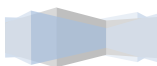
- a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Aplikasi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan aplikasi;
 - c. melaksanakan koordinasi,kerjasama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang aplikasi;
 - d. menyiapkan data informasi tentang aplikasi;
 - e. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis aplikasi;
 - f. melaksanakan penggabungan system manajemen database,layanan web,replikasi dan federasi system;
 - g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis aplikasi;
 - h. membagi tugas,bimbingan,memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Aplikasi;
 - i. melakukan pemantauan,evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Aplikasi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Seksi Telematika

Seksi Telematika mempunyai tugas melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengembangan dan pengendalian telematika secara aplikasi telematika sesuai dengan petunjuk teknis yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Telematika sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan,norma,kriteria,dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang system informasi;
- c. melaksanakan evaluasi bidang keamanan system informasi dan perangkat keras,perangkat lunak serta bidang konten;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dibidang e-government, perangkat lunak dan konten,pemberdayaan telematika,standarisasi dan monitoring;
- e. memberikan pelayanan dan bimbingan teknis,serta evaluasi dibidang infrastruktur aplikasi tatalaksana e-government, aplikasi layanan public dan pemerintahan;



- f. melaksanakan kerjasama program e-government antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta;
 - g. melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen system informasi daerah;
 - h. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Telematika;
 - i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Telematika; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- Seksi Infrastruktur dan teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. merencanakan kegiatan dan program Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - c. menyiapkan data informasi perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta Sarana dan Prasarana;
 - d. menyiapkan materi bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pengelolaan perangkat infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis pengadaan komputer, pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan pembangunan dan pengembangan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan teknologi informasi daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras infrastruktur jaringan teknologi informasi serta sarana dan prasarana;
 - i. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Bidang Statistik dan Persandian
1. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Bidang Statistik dan Persandian dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan keamanan informasi;
 - b. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan kebijakan keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - d. perumusan peraturan teknis pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;



- e. pengelolaan sumber daya manusia sandi;
 - f. pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Seksi Statistik
- Seksi Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dan melaksanakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dn petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis supervise survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan survey dibidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS; dan
- b. Seksi Persandian
- Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Persandian dalam menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- a. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;
 - b. melakukan klasifikasi informasi milik pemerintah daerah;
 - c. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;.
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian
- Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, sumberdaya persandian dan operasional Pengamanan Persandian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
- a. melaksanakan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian dan pengelolaan sumberdaya persandian;
 - b. melaksanakan penyiapan instrument pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
 - c. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- d. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- e. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;.
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik belum memiliki UPT.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik belum memiliki pejabat fungsional.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Tahun 2017 -2021

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	0	75	80	87	92
	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPID Utama ke Badan Publik	50%	75%	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan online melalui LAPOR! SP4N yang ditanggapi Badan Publik	35%	75%	100%	100%	100%
Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	2	3	6

(KIM)						
Meningkatnya penyebaran informasi Pemerintah Daerah	Jumlah mass media yang melakukan kerjasama penyediaan informasi pada advetorial online	0	50	75	100	100
	Jumlah informasi publik/kebijakan /pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan melalui web	0	800	800	1000	1200
Meningkatnya penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	0	-	2,1	2,4	2,8
Meningkatnya Statistik Sektor Perangkat Daerah yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase PD dengan Statistik Sektor berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	0%	15%	35%	50%	100%
Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	0%	20%	50%	75%	100%
	Jumlah maksimal kejadian	0	5	3	1	0



	penerobosan pengamanan informasi Pemerintah Daerah					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	-	-	C	CC	B
	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	0	75	100	100	100
	Persentase aset yang tercatat dan dilaporkan status assetnya	0	75	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi public	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	100
	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPID Utama ke Badan Publik	100%
	Persentase pengaduan online melalui LAPOR! SP4N yang ditanggapi Badan Publik	100%
Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	5
Meningkatnya penyebaran informasi Pemerintah Daerah	Jumlah mass media yang melakukan kerjasama penyediaan informasi pada advetorial online	75%



	Jumlah informasi publik/kebijakan /pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan melalui web	800
Meningkatnya penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	2,1
Meningkatnya Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase PD dengan Statistik Sektoral berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	50%
Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	50%
	Jumlah maksimal kejadian penerobosan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	C
	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100
	Persentase aset yang tercatat dan dilaporkan status assetnya	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja terhadap realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik	Indeks/Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	100	82	82%%
	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPID Utama ke Badan Publik	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan online melalui LAPOR! SP4N yang ditanggapi Badan Publik	100%	100%	100%
Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	5	2	40%
Meningkatnya penyebaran informasi Pemerintah Daerah	Jumlah mass media yang melakukan kerjasama penyediaan informasi pada advetorial online	75	75	100
	Jumlah informasi	800	1200	150%

	publik/kebijakan /pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan melalui web			
Meningkatnya penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	2,1	1,8	85.7%
Meningkatnya Statistik Sektor Perangkat Daerah yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase PD dengan Statistik Sektor berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	50%	50%	100%
Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian	Jumlah maksimal kejadian penerobosan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	5	0	500%
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	35%	23%	66%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	C	CC	CC
	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase aset yang tercatat dan dilaporkan status assetnya	100%	100%	100%



B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 7 (tujuh) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator tersebut hampir seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata $\geq 130\%$ dari target. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik

Indikator	2018	2019			Capaian 2019 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks/Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	80	100	82	82%	48,5%
Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPID Utama ke Badan Publik	100	100	100	100%	70,6%
Persentase pengaduan online melalui LAPOR! SP4N yang ditanggapi Badan Publik	100	100	100	100%	73%
Rata-rata Capaian				94%	64%

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (diskominfotik) Kabupaten Bengkalis baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 dimana diskominfotik berasal dari urusan komunikasi informasi di Dinas Perhubungan dan Kominfo, urusan komunikasi (publikasi) di Bagian Humas dan Bagian Pengelolaan Data Elektronik Sekretariat Daerah Bengkalis. Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur kewenangan urusan. Dapat disampaikan bahwa terkait dengan berlakunya PP 18 tahun 2016 ini dan berkenaan dengan baru berdirinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis pada tahapan perencanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 diskominfotik tidak memiliki Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (renja), dan Rencana Strategis (renstra) sementara pemahaman dan pengetahuan terkait kewenangan urusan, sub urusan, program dan kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian belum begitu dipahami.

Disisi lain dengan kurang baiknya kerjasama pada tahapan perencanaan RKA 2019 semakin membuat rendahnya sinkronisasi antara program, kegiatan dan capaian kinerja. Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena banyak program yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tetapi tidak terdapat programnya di RPJMD,

kemudian pendanaan pagu program RPJMD yang membatasi dimana pagu program yang terdapat di Renstra tidak boleh melebihi pagu program yang ada di RPJMD. Hal ini semakin mempersempit ruang gerak didalam penyusunan renstra yang sesungguhnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Sasaran 1 adalah:

1. komitmen Pimpinan
2. kerjasama dan koordinasi internal antar unit kerja yang baik
3. koordinasi dan kerjasama yang baik antara PPID Utama dan PPID Pembantu
4. Dukungan regulasi, Pengalaman kerja dan Pendanaan

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian indikator pada Sasaran 1 ini sudah berhasil dengan baik yaitu dari target 100 capaiannya sebesar 82. Berdasarkan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau terdapat beberapa kriteria penilaian yang menjadi informasi publik namun belum disampaikan ke publik secara serta merta.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau dapat disimpulkan beberapa langkah yang menjadi solusi dan strategi pemecahan masalah, seperti:

1. melakukan pembenahan aparatur pelayanan informasi terhadap tata kerja pelayanan informasi publik;
2. melakukan koordinasi yang lebih intensif dan membangun komitmen PD yang merupakan badan publik sebagai mitra kerja penyedia informasi untuk melengkapi Daftar Informasi Publik (DIP) masing-masing PD;
3. memberikan penghargaan kepada PD yang membangun komitmen kepada seluruh PD untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dengan cara melengkapi DIP

Sasaran 2

Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Indikator	2018	2019			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	5	2	40%	18%
Rata-rata Capaian				40%	18%

Target capaian indikator pada Sasaran 2 ini rendah yaitu dari target 5 kecamatan capaiannya 2 kecamatan. Target pada akhir periode Renstra tahun 2021 adalah 11 kecamatan. Dari sisi perencanaan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak terdapat kegiatan Pengembangan dan



Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Namun sudah menjadi komitmen PD untuk memenuhi capaian SPM yang menjadi tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sehingga melalui pelaksanaan kegiatan yang berada di Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di beberapa kecamatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap fungsi dan peranan KIM ini tetap diupayakan. Pada tahun 2020 ini sesuai dengan DPA tahun 2020 kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM baru dapat dilaksanakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 2 ini adalah:

1. komitmen pimpinan
2. kerjasama dan koordinasi internal antar unit kerja yang baik

Permasalahan/Hambatan

1. terbatasnya pagu anggaran/tidak adanya kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
2. tidak terdapatnya/kosongnya pejabat pengawas yang membidangi KIM.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Untuk meningkatkan capaian SPM ini diperlukan komitmen pengambil kebijakan terhadap anggaran terutama yang terkait SPM dan layanan utama yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sasaran 3

Meningkatnya penyebaran informasi Pemerintah Daerah

Indikator	2018	2019		Capaian 2017 thdp 2021	
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah mass media yang melakukan kerjasama penyediaan informasi pada advetorial online	100%	75	75	100%	61,5%
Jumlah informasi publik/kebijakan /pembangunan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan melalui web	100%	800	1200	150%	65%
Rata-rata Capaian				125%	63,3%

Pada Sasaran 3 terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian 100% dan 150%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 3 ini adalah:

1. Komitmen pimpinan
2. Aparatur yang berpengalaman
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
4. Kerjasama yang baik dengan PD dan mass media terhadap penyediaan dan penyebaran informasi public/kebijakan dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Permasalahan/Hambatan

Tidak ditemukan permasalahan yang berarti didalam kegiatan ini.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Untuk memperkaya data dan informasi yang disampaikan melalui website kiranya dapat dicermati melalui kerjasama dan koordinasi yang baik dengan antar Perangkat Daerah.

Sasaran 4

Meningkatnya penerapan e-Government

Indikator	2018	2019			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	2,1	1,8	85,7%	24,6%
Rata-rata Capaian				100%	23,64%

Capaian indikator pada Sasaran 6 adalah 85,7% tercapai nilai indeks 1,8 dari target yang ditetapkan 2,1 dengan persentase capaian sebesar 85,7% Penilaian indeks SPBE ini dimulai pada tahun 2018, sementara untuk tahun 2019 nilai indeks SPBE belum dinilai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 4 ini adalah:

1. Komitmen pimpinan
2. Adanya dukungan aparatur IT (informasi teknologi) yang baik
3. Adanya penyusunan rencana program/kegiatan yang baik
4. Adanya dukungan anggaran



Permasalahan/Hambatan

Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terhadap 3 (tiga) kriteria penilaian yaitu domain kebijakan SPBE dengan nilai 2,24 dari 4, domain tata kelola SPBE dengan nilai 1,29 dari 4, dan domain layanan SPBE dengan nilai 1,94 dari 4 dengan bobot penilaian dari setiap domain yaitu 17%, 28% dan 55% dapat disimpulkan bahwa domain yang sangat berpengaruh terhadap capaian nilai indeks SPBE adalah domain layanan SPBE.

Sasaran 5

Meningkatnya Statistik Sektor Perangkat Daerah yang berkualitas dan terintegrasi

Indikator	2018	2019			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase PD dengan Statistik Sektor berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	100%	50%	35%	70%	85%
Rata-rata Capaian				70%	85%

Capaian indikator pada Sasaran 5 adalah 70% dari target 100% yaitu tercapai 35% PD dari target 50% PD yang ditetapkan tahun 2019.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 5 ini adalah:

1. Komitmen pimpinan
2. Adanya koordinasi yang baik terhadap PD yang berkedudukan sebagai produsen data sektoral
3. Adanya pejabat pengawas yang membidangi pengelolaan statistik sektoral
4. Adanya dukungan anggaran

Permasalahan/Hambatan

Pada tahun 2017 s.d. 2019 telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat administrator sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Bidang Statistik dan Persandian. Selain pergantian pejabat administrator, dari tahun 2017 s.d. akhir 2018 tidak terdapatnya pejabat pengawas yang membidangi pengelolaan data sehingga hal ini juga berpengaruh besar kinerja pengelolaan data statistik sektoral. Permasalahan/hambatan lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan data adalah

kurangnya/tidak adanya aparatur yang mempunyai latar belakang pendidikan ilmu statistik.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Agar terlaksananya dan tercapainya pengelolaan statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi diperlukan dukungan aparatur pengelola data statistik yang mempunyai latar belakang ilmu statistik. Kemudian perlu dibentuk suatu forum koordinasi yang melibatkan seluruh PD termasuk instansi vertikal sebagai wadah pertemuan dan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral.

Sasaran 6

Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian

Indikator	2018	2019			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	100%	50%	25%	50%	75%
Jumlah maksimal kejadian penerobosan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	-	5	0	500%	500%
Rata-rata Capaian				275%	287,5%

Pada Sasaran 6 capaian indikator pertama dan kedua di tahun 2019 adalah adalah 70% dan 500%. Dari 46 PD seluruh kecamatan yaitu sebanyak 11 kecamatan telah memiliki akun sanapati persandian. Sementara jumlah kejadian penerobosan pengamanan informasi Pemerintah Daerah dari target sebanyak 5 kejadian relaisainya 0 kejadian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 6 ini adalah:

1. Komitmen pimpinan
2. Adanya koordinasi yang baik seluruh kecamatan yang tekah memiliki dan menggunakan akun sanapati dalam komunikasi antar PD.
3. Adanya dukungan anggaran



Permasalahan/Hambatan

Rendahnya capaian pada jumlah PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD adalah dikarenakan sebagian besar PD yaitu 35 PD belum memiliki akun sanapati. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah harus mendapat fasilitasi dari Persandian Provinsi untuk berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara(BSSN). Hal ini menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi langsung ke BSSN selain disebabkan oleh padatnya rutinitas BSSN untuk melayani seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Untuk diketahui bahwa Bidang Statistik dan Persandian telah mengusulkan akun sanapati Persandian untuk 35 PD sejak akhir tahun 2018 namun sampai saat ini belum terealisasi.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Dikarenakan adanya aturan yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah yang melakukan koordinasi ke BSSN harus melalui fasilitasi dari Persandian provinsi selain dikarenakan oleh sibuknya rutinitas BSSN dan sebagaimana diketahui bersama bahwa penyelenggaraan Persandian ini merupakan otoritas BSSN, sehingga untuk peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan Persandian dilakukan dengan cara seringnya berkoordinasi dan berkomunikasi baik dengan Persandian provinsi maupun BSSN.

Sasaran 7

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator	2018	2019			Capaian 2017 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	-	C	CC	100%	100%
Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	-	100	100	100%	100%
Persentase aset yang tercatat dan dilaporkan status assetnya	100%	100	100	100%	54%
Rata-rata Capaian				100%	84,7%

Pada Sasaran 7 capaian indikator pertama, kedua dan ketiga di tahun 2019 adalah 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator pada Sasaran 6 ini adalah:



1. Komitmen pimpinan
2. Adanya koordinasi yang baik dari unit kerja
3. Adanya aparatur dengan SDM yang baik.
4. Adanya dukungan anggaran

Permasalahan/Hambatan

Rendahnya capaian pada jumlah PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD adalah dikarenakan sebagian besar PD yaitu 35 PD belum memiliki akun sanapati. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah harus mendapat fasilitasi dari Persandian Provinsi untuk berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara(BSSN). Sehingga hal ini menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi langsung ke BSSN selain disebabkan oleh padatnya rutinitas BSSN untuk melayani seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Untuk diketahui bahwa Bidang Statistik dan Persandian telah mengusulkan akun sanapati Persandian untuk 35 PD sejak akhir tahun 2018 namun sampai saat ini belum terealisasi.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Dikarenakan adanya aturan yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah yang melakukan koordinasi ke BSSN harus melalui fasilitasi dari Persandian provinsi selain dikarenakan oleh sibuknya rutinitas BSSN dan sebagaimana diketahui bersama bahwa penyelenggaraan Persandian ini merupakan otoritas BSSN, sehingga untuk peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan Persandian dilakukan dengan cara seringnya berkoordinasi dan berkomunikasi baik dengan Persandian provinsi maupun BSSN.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 adalah sebesar Rp19.460.049.097,- atau 89,49% dari pagu sebesar Rp21.744.828.653,- Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran 3 yaitu sebesar Rp7.146.041.256,-Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran 1 yaitu Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik. Adapun rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Belanja gaji dan tunjangan pegawai	100%	2.556.139.169,-	2.294.067.182,-	89,75%
Tambahan penghasilan pegawai	100%	4.097.520.000,-	3.121.118.000,-	76,17%
Total		6.653.659.169,-	5.415.185.182,-	81,39%

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%

Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik	94%	1.191.649.400,-	831.892.910,-	69,81%
Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	40%			-
Meningkatnya penyebaran informasi Pemerintah Daerah	125%	8.192.068.910,-	7.788.426.756,-	96,08%
Meningkatnya penerapan e-Government	100%	2.218.540.000,-	2.143.991.309,-	96,64%
Meningkatnya Statistik Sektor Perangkat Daerah yang berkualitas dan terintegrasi	70%	375.570.000,-	282.806.145,-	75,30%
Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian	275%	123.836.074,-	96.161.800,-	77,65%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100%	2.989.505.100,-	2.901.584.995,-	97,05%
Total		15.091.169.484,-	14.044.863.915,-	93,07%



D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik	94%	69,81%	24,19%
2	Meningkatnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	40%	-	100%
3	Meningkatnya penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah	125%	96,08%	28.92%
4	Meningkatnya penerapan e-Government	100%	96,64%	3,36%
5	Meningkatnya Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang berkualitas dan terintegrasi	70%	75,30%	-5,3%
6	Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian	275%	77,65%	197.35%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	100%	97,05%	2,95%



PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah tercapai dengan baik, yaitu dari 7 (tujuh) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator sasaran dimana 6 sasaran capaiannya di atas 70%, hanya 1 (satu) sasaran yang capaiannya 40%, 11 (sebelas) indikator capaian kinerja di atas 70% dan 2 (dua) indikator yang capaiannya dibawah 70%.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan, kerjasama dan koordinasi baik internal unit kerja maupun antar PD, kerja keras dan keuletan aparatur, serta dukungan anggaran dan regulasi yang baik. Namun demikian, untuk tahun 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang baik antara Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bidang dan seluruh aparatur terkait perencanaan program/kegiatan, sasaran, target dan kinerja yang ditetapkan;
2. Melakukan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Bengkalis, serta Inspektorat Kabupaten Bengkalis
3. Melakukan rapat internal secara rutin berkenaan dengan evaluasi sasaran, target dan kinerja kegiatan.

